

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI KABUPATEN REMBANG**

Dini Dwi Anggraini<sup>1</sup>, Retna Hanani<sup>2</sup>, Sri Suwitri<sup>3</sup>

Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407  
Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pendidikan menjadi aspek penting yang disoroti oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pengembangan Manusia yang masih rendah, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang melihat implementasi kebijakan sebagai eksekusi dari kebijakan dasar berupa undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif atau badan peradilan. Peneliti menggunakan teori model implementasi oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn untuk dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengambilan studi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh masih ditemukannya faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya finansial yang masih terbatas, sumber daya waktu yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, hingga lingkungan ekonomi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang berpotensi tidak memenuhi target pendapatan daerah. Peneliti memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam meningkatkan sumber dana, menentukan tenggat waktu pengumpulan laporan pertanggung jawaban yang tegas, dan mendorong diversifikasi sektor ekonomi lokal yang potensial.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Beasiswa, Pendidikan.

## **Implementation of The High Education Achievement Scholarship Policy in Rembang District**

### **ABSTRACT**

Education becomes an important aspect highlighted by the Government of Rembang Regency. In order to improve the Human Development Index, which is still low, the Government of Rembang Regency has established the High Education Achievement Scholarship policy. This research was conducted to describe the implementation of the High Education Achievement Scholarship policy in Rembang Regency, and to identify supporting and inhibiting factors in the implementation of the High Education Achievement Scholarship policy in Rembang Regency. This study uses the policy implementation theory according to Daniel Mazmanian and Paul Sabatier, which views policy implementation as the execution of basic policies in the form of laws and decisions issued by executive or judicial bodies. The researcher uses the implementation model theory by Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn to identify supporting and inhibiting factors in the implementation of the High Education Achievement Scholarship Policy. This research uses a descriptive qualitative approach with a study conducted at the Department of Education, Youth, and Sports of Rembang Regency. The results show that the implementation of the High Education Achievement Scholarship policy still has many shortcomings. This is due to the presence of inhibiting factors in policy implementation, including limited financial resources, underutilized time resources, and the economic environment within Rembang Regency which potentially does not meet the targets for local revenue. The researcher recommends that the Government of Rembang Regency collaborate with the private sector to increase funding sources, set clear deadlines for accountability report submissions, and encourage diversification of potential local economic sectors.

Keywords: Policy Implementation, Scholarship, Education.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu sektor penting yang harus diperhatikan dalam kelangsungan hidup sebuah negara, dan merupakan kebutuhan dasar manusia adalah pendidikan. Pendidikan juga merupakan sektor terpenting dalam meningkatkan dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sehingga suatu pendidikan itu harus berkualitas karena menjadi kunci utama dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia. (Safrida et al, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan aspek pemerintahan yang bersifat konkuren, yakni dibagi antara tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah. Pemerintah pusat kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan regulasi pembagian tugas pemerintahan. Dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merancang kebijakan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Pendidikan dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingginya kualitas pendidikan Indonesia sangat ditentukan melalui bagaimana tingkat kualitas pendidikan di setiap daerah. Jika kualitas pendidikan di

daerah meningkat, maka kualitas pendidikan Indonesia pun akan meningkat.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk, dengan tujuan memenuhi hak dan kewajiban dasar. Konsep ini diperinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menguraikan adanya pembagian tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan yang bersifat mutlak merupakan wewenang Pemerintah Pusat, sementara tugas pemerintahan yang bersifat konkuren menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari prinsip otonomi daerah. Kabupaten Rembang sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan warga Kabupaten Rembang.

Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, merupakan bentuk konkret dari komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam memperluas dan menyamakan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut, terutama bagi individu berprestasi yang berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Kegiatan pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan

Tinggi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020. Bentuk bantuan beasiswa ini berupa pemberian dana yang dihitung setiap semester, dengan batas waktu studi paling lama delapan (8) semester bagi mahasiswa penerima beasiswa. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang juga berwenang menetapkan mekanisme teknis pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi untuk masyarakat yang berprestasi di bidang akademis dan berasal dari keluarga tidak mampu.

Terkait dengan maksud dan tujuan diimplementasikannya kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Rembang merupakan maksud utama dari kebijakan beasiswa ini. Sementara itu, tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan akses pendidikan tinggi, memberikan jaminan pendidikan tinggi, meningkatkan mutu sumber daya manusia, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang.

Sejak tahun 2014, penghitungan IPM mulai menggunakan metode baru dari *United Nations Development Programme* (UNDP). Indikator penghitungan IPM yang baru ini meliputi: (1) Usia Harapan Hidup

saat lahir (UHH), (2) Harapan Lama Sekolah (HLS), (3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, dan (4) Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Uraian perbandingan komponen penyusun IPM Kabupaten Rembang dengan rata-rata komponen penyusun IPM Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 1 Perbandingan Komponen Penyusun IPM Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah**

Komponen Penyusun IPM	Tahun					
	2020		2021		2022	
	JTG	RBG	JTG	RBG	JTG	RBG
Usia Harapan Hidup (UHH)	74,37	74,55	74,47	74,61	74,57	74,68
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,70	12,11	12,77	12,12	12,81	12,13
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,16	7,75	7,30	7,93	7,41
Pengeluaran Perkapita	10930	10328	11034	10519	11377	10937

**Sumber:** BPS Jawa Tengah

Jika dilihat dari komponen penyusunnya, komponen penyusun IPM Kabupaten Rembang yang tergolong rendah adalah komponen pendidikan (HLS dan RLS), dan pengeluaran per kapita. Hal tersebut yang menyebabkan IPM di Kabupaten Rembang masih rendah dibandingkan kabupaten sekitar.

Berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, salah satunya adalah

dengan dilaksanakannya kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Namun dalam realitanya masih belum dapat berjalan optimal dalam meningkatkan IPM Kabupaten Rembang yang masih tertinggal dari kabupaten sekitar dan rata-rata IPM Jawa Tengah, khususnya pada komponen pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) yang dibuktikan pada tabel 1.1 di atas.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang,” yang melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dalam proses pengumpulan data dan sebagai lokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Administrasi Publik**

Chandler dan Plano (dalam Malawat, 2022) mengungkapkan bahwa proses pengkoordinasian dan pengorganisasian sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik dapat disebut sebagai administrasi publik.

Kemudian dalam Pasolong (2007) dan Malawat (2022), kegiatan sekelompok orang atau lembaga yang bekerja sama melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik yang efektif dan efisien merupakan bentuk suatu administrasi publik. Kemudian Willoughby, dalam Dimock (1986:22), menyatakan bahwa administrasi publik adalah suatu bentuk fungsi yang mengimplementasikan hukum sesuai dengan yang dinyatakan oleh badan legislatif dan ditafsirkan oleh badan yudikatif pemerintah. Sementara itu, Leonard D. White juga menyatakan bahwa administrasi publik melibatkan semua tindakan yang ditujukan untuk pelaksanaan atau penerapan kebijakan negara. Selanjutnya, menurut Beddy Iriawan Maksud (2017:226) dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer," administrasi publik didefinisikan sebagai suatu proses kerjasama rasional yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah. Dalam proses ini, untuk melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pencapaian tujuan negara dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik, sumber daya dan personel publik harus diorganisir dan dikoordinasikan.

Berdasarkan beberapa penjabaran ahli mengenai definisi administrasi publik,

dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pemerintah dalam upaya pengelolaan dan pengkoordinasian sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan awal yang ditetapkan sebelumnya. Dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, implementor kebijakan yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Rembang dan mencapai tujuan awal kebijakan ini, yaitu meningkatkan IPM Kabupaten Rembang.

## **2. Model Implementasi Kebijakan**

Dalam Kurniawan (2014), Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1980) memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan untuk menjalankan keputusan kebijakan dasar. Keputusan ini umumnya berbentuk undang-undang, perintah eksekutif atau putusan badan peradilan yang berwenang. Keputusan dasar tersebut mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, dan menyusun berbagai langkah untuk mengorganisir dan mengatur rangkaian proses implementasinya. Selanjutnya, Mazmanian dan Sabatier

dalam Subianto (2020), memandang bahwa perumusan suatu kebijakan dan implementasinya secara analitis memang dapat dibedakan, tetapi bukan merupakan entitas terpisah. Berdasarkan konsep ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan serangkaian tindakan lanjutan setelah penetapan kebijakan, mencakup pengambilan keputusan, tahapan strategis, dan kegiatan operasional. Tujuannya adalah mewujudkan terealisasinya kebijakan dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan model implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn (1975), seperti yang diuraikan oleh Subarsono (2005:99), mengembangkan model pendekatan sebagai suatu fenomena yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan menyebutnya dengan "*A Model of the Policy Implementation*". Enam aspek kunci dalam model ini mencakup:

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Untuk mencegah terjadinya multi interpretasi serta konflik di antara pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan, suatu kebijakan harus memiliki kejelasan standar dan sasaran serta dapat diukur.
- b. Sumber daya. Diperlukan dukungan sumber daya manusia maupun non-manusia dalam suatu implementasi

- kebijakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana. Dalam hal implementasi kebijakan, birokrasi, penerapan etika atau norma-norma, serta pola hubungan dalam birokrasi, dapat memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan.
  - d. Disposisi implementor atau sikap para pelaksana. Disposisi implementor disini mencakup respons, pemahaman, dan intensitas disposisi implementor terhadap kebijakan, yang dapat memengaruhi kemauan mereka untuk melaksanakannya.
  - e. Komunikasi antar organisasi terkait. Dukungan dan koordinasi dengan instansi lain sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan. Maka dari itu, perlu komunikasi efektif agar kerja sama antar instansi terkait dapat terjalin dengan baik dan dapat membawa pada keberhasilan suatu implementasi kebijakan itu sendiri.
  - f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Aspek lingkungan eksternal ini mencakup sumber daya ekonomi di lingkungan pengimplementasian kebijakan, dukungan dan kerja sama dari kelompok kepentingan, sikap partisipan, opini publik, serta dukungan elite politik.

Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini, model tersebut menjadi suatu kerangka kerja yang holistik untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokus dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, dengan fokusnya adalah pada kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. Pemilihan lokus dan fokus ini didasarkan karena kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi merupakan program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Rembang, dimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga lah yang diberi amanah untuk melaksanakan teknis kebijakan ini. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan informan yang meliputi Kasubbag Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, staff pengelola penyaluran beasiswa di perguruan tinggi, serta mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dan data yang didapat dari observasi terhadap objek penelitian. Selain data primer, juga terdapat data sekunder yang peneliti dapatkan dari jurnal, artikel, data publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang,

dokumen resmi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, serta bahan bacaan lain mengenai topik yang peneliti bahas pada penelitian ini. Pemeriksaan informasi pada penelitian ini terdiri atas tiga tahapan yaitu proses mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperoleh data yang valid, reliabel, dan objektif dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Terdapat tiga pembagian triangulasi yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang**

Suatu kebijakan publik pasti memiliki tujuan mengapa kebijakan tersebut ditetapkan. Seperti halnya dengan Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, dalam Pasal 2 Ayat (2) disampaikan terkait tujuan pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi sebagai berikut.

“Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

ditetapkannya kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah untuk meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Rembang yang berprestasi dan berasal dari latar belakang keluarga tidak mampu.

Sejalan dengan tujuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tersebut, tujuan adanya kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang adalah selain untuk memfasilitasi masyarakat Kabupaten Rembang yang tidak dapat menyetor biaya perkuliahan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan IPM Kabupaten Rembang.

Sejak kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi ini diimplementasikan mulai dari 2017 hingga 2023 kini mencapai 350 mahasiswa, yang diantaranya berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Selanjutnya, terkait dengan tujuan kedua adanya beasiswa ini adalah untuk meningkatkan IPM Kabupaten Rembang. IPM Kabupaten Rembang masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah. Hal inilah yang menjadi alasan diharapkan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi



dapat meningkatkan IPM Kabupaten Rembang. Selain itu, Kasubbag Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang juga berharap semakin banyak mahasiswa atau masyarakat Rembang yang dapat merasakan manfaat adanya beasiswa ini. Dari kedua hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang masih belum optimal, ditandai dengan adanya ketidakstabilan jumlah penerima beasiswa tiap tahun dan masih rendahnya IPM Kabupaten Rembang.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang**

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005), implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, sikap para pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, untuk dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dapat dilakukan dengan menggunakan teori model implementasi dari Meter dan Horn sebagai berikut.

### **a. Standar dan sasaran kebijakan**

Implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi telah memiliki kejelasan standar dan sasaran. Kejelasan standar disini adalah implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang berpegang pada Peraturan Bupati Rembang No. 48 Tahun 2020 dan Juknis Beasiswa Dikti yang disusun setiap tahun. Sedangkan sasaran akhirnya adalah untuk meningkatkan IPM Kabupaten Rembang. Kejelasan standar dan sasaran inilah yang dijadikan sebagai arah berjalannya implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi hingga saat ini.

### **b. Sumber daya**

Sumber daya dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang dibagi menjadi sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Sumber daya non-manusia meliputi sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya finansial, serta sumber daya waktu.

#### **1) Sumber daya manusia**

Aktor dalam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan

Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah Kepala Dinas. dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia telah digunakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi merupakan program unggulan dalam rangka pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Rembang, yang teknis pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Seluruh sumber daya manusia yang berada di semua bidang terlibat mulai dari awal pelaksanaan kebijakan hingga monitoring. Sumber daya manusia yang terlibat antara lain Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbag, dan seluruh staff di Subbag Program. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia telah digunakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

2) Sumber daya sarana dan prasarana Berdasarkan pernyataan Kasubbag Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

mengenai sumber daya sarana dan prasarana, tidak ada sarana dan prasarana yang dikhususkan untuk implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Karena kebijakan ini merupakan program bersama, maka seluruh sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat digunakan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi gedung, perangkat elektronik, printer, laptop dan lain sebagainya, semuanya dapat digunakan untuk menunjang pada kesuksesan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

3) Sumber daya finansial

Dalam Juknis Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi 2023, jumlah kuota penerima beasiswa disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tiap tahunnya. alasan utama yang melatarbelakangi persentase DPA adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berbeda-beda setiap tahun. Karena Kabupaten Rembang termasuk daerah yang APBD nya kecil, pengalokasian dana untuk kebijakan-kebijakan pemerintah perlu pertimbangan-pertimbangan

yang disesuaikan dengan kondisi dan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang. Untuk menyesuaikan besaran anggaran yang diterima dengan anggaran yang dialokasikan, maka dilakukan pembatasan kuota penerima beasiswa tiap tahunnya, sesuai dengan anggaran yang ada. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang memang menaksir standar kuota penerima beasiswa adalah untuk 50 mahasiswa, tetapi dalam realisasinya harus disesuaikan dengan persebaran mahasiswa dan biaya hidupnya. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi masih terbatas. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kuota penerima beasiswa yang berbeda dari target atau standar yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

4) Sumber daya waktu

Sumber daya waktu telah digunakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Rembang, terutama dalam hal pembentukan tim hingga monitoring implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Namun terkait sumber daya waktu dalam proses pencairan, belum berjalan dengan baik. Lama waktu pencairan beasiswa tidak selalu tepat waktu, dimana hal ini dipengaruhi oleh lingkungan internal mahasiswa penerima beasiswa yang seringkali lambat dalam mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) beasiswa. Selain itu terdapat faktor dari lingkungan eksternal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang yang juga sangat mempengaruhi lama waktu pencairan, yaitu permasalahan anggaran pemerintah daerah ataupun lamanya perjanjian kerja sama yang harus diselesaikan antara pihak dinas dengan perguruan tinggi.

c. **Karakteristik organisasi pelaksana**

Meter dan Horn dalam Subarsono (2005 : 99), mengemukakan bahwa karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan mencakup norma-norma yang ada dalam birokrasi. Karakteristik organisasi pelaksana yang dilihat dari pelaksanaan tahap demi tahap

mekanisme implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi telah dipenuhi dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pihak dinas telah melaksanakan kebijakan beasiswa tersebut sesuai dengan standar, prosedur dan regulasi atau peraturan yang berlaku. Dari sisi pelaksanaan beasiswa di perguruan tinggi, pelaksanaan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang terhadap standar operasional prosedur pengelolaan beasiswa yang ada di Universitas Diponegoro dapat dibilang sesuai. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada selalu dilakukannya proses validasi data mahasiswa penerima beasiswa yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan yang merupakan salah satu tahap pengelolaan beasiswa di lingkungan universitas.

**d. Disposisi implementor**

Dalam konsep implementasi kebijakan publik, Van Meter dan Van Horn mengemukakan tiga aspek penting yang mencakup disposisi implementor atau sikap para pelaksana, seperti yang dijelaskan dalam Subarsono (2009: 55). Ketiga aspek tersebut adalah respon implementor, kognisi atau

pemahaman implementor, dan intensitas atau preferensi nilai yang dimiliki implementor. Berdasarkan teori tersebut, disposisi implementor pada implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi akan peneliti jabarkan menjadi tiga hal penting tersebut. (1) Staff di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang telah menunjukkan respon yang baik sebagai implementor kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Baik itu dalam memberikan pelayanan terkait pengumpulan berkas administrasi sebagai syarat pendaftaran beasiswa maupun saat mengumpulkan LPJ beasiswa. (2) Kognisi atau pemahaman implementor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah menunjukkan kualitas yang baik. Dimana seluruh staff dapat memberikan jawaban yang dapat membantu mahasiswa yang belum memahami berbagai hal terkait Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, dengan memberikan jawaban yang baik dan menunjukkan kompetensi mereka dibidangnya. (3) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai implementor kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi telah melakukan pemenuhan azas transparansi dan akuntabilitas, serta

mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam interaksinya dengan mahasiswa. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa disposisi implementor atau sikap para pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah dilaksanakan dengan baik.

**e. Komunikasi antar organisasi**

Van Meter dan Van Horn, seperti yang diuraikan dalam Subarsono (2005: 99), menyatakan bahwa untuk berhasil dalam implementasi kebijakan, perlu adanya dukungan dan koordinasi antara berbagai instansi terkait. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi yang efektif menjadi krusial untuk memastikan terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang baik antar instansi, yang pada akhirnya akan membawa kesuksesan bagi suatu kebijakan. Komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dapat dilihat pada dukungan, koordinasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan. (1) Instansi-instansi yang mendukung implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi antara lain Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB), yang berperan dalam

mengeluarkan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat bagi calon penerima beasiswa, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) yang berperan mengelola keperluan penganggaran, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berperan dalam menyusun perencanaan atau membuat desain pelaksanaan kebijakan. (2) Koordinasi telah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kontak PIC Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang yang telah dipegang oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan, sehingga dapat memudahkan koordinasi antara kedua pihak. (3) Dalam hal kerja sama untuk penyebaran informasi terkait Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, dilakukan dengan memanfaatkan bantuan dari mahasiswa penerima beasiswa yang tergabung dalam organisasi FABs Rembang. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Rembang untuk mengunggah segala informasi terkait beasiswa ke *website*, Instagram, Facebook, dan TikTok resmi milik Pemerintah Kabupaten Rembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

kerja sama yang telah terjalin ini menjadi faktor pendukung implementasi Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi telah dijalankan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dengan berbagai instansi terkait. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari instansi lain seperti DINSOSPPKB, BPPKAD, dan BAPPEDA terkait dengan tahap demi tahap pelaksanaan kebijakan, kemudian terpeliharanya komunikasi dan koordinasi antara pihak DINDIKPORA dengan Perguruan Tinggi yang bersangkutan, serta terjalinnya kerja sama dengan DISKOMINFO dan FABs Rembang dalam menyebarkan informasi terkait Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

#### **f. Lingkungan eksternal**

Meter dan Horn (dalam Subarsono 2005 : 99), mengemukakan terkait dengan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa jenis lingkungan eksternal tersebut meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, dan lingkungan politik. Dalam penelitian ini, lingkungan eksternal

yang mempengaruhi implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang dijabarkan sebagai berikut.

##### 1) Lingkungan ekonomi

Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak memenuhi target pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat mempengaruhi naik turunnya alokasi DPA di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Dampak akhirnya adalah terjadinya ketidakstabilan kuota penerima beasiswa. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi masih belum dapat memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

##### 2) Lingkungan sosial

Dukungan sosial dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi yang ada saat ini adalah dukungan dari mahasiswa penerima beasiswa yang tergabung dalam organisasi FABs Rembang, dan dari kepala desa. Mahasiswa FABs memberi dukungan dalam bentuk partisipasi pada salah satu pelaksanaan program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu program GASPOL 12. Program ini merupakan program pengentasan anak tidak

sekolah di desa-desa dengan angka pendidikan anak yang masih rendah. Dalam program ini, mahasiswa FABs berpartisipasi dalam kegiatan terjun langsung ke desa-desa tersebut dengan tujuan mengajak anak yang tidak sekolah untuk kembali ke sekolah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Rembang. Di sela-sela memberikan ajakan untuk kembali ke sekolah, mahasiswa menitipkan informasi mengenai adanya kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. Dari sini, dukungan kepala desa dapat terlihat dengan dilakukannya penyebaran informasi terkait adanya kebijakan beasiswa tersebut kepada seluruharganya.

### 3) Lingkungan politik

Selama ini belum pernah ada pihak eksekutif ataupun legislatif yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap adanya kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Dalam pembahasan anggaran baik itu di BAPPEDA, tingkat TAPD, ataupun di tingkat Panggar DPRD, kebijakan beasiswa ini selalu mendapat dukungan untuk diprioritaskan anggarannya. Hal ini dikarenakan hasil akhir dari kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi diharapkan dapat meningkatkan IPM Kabupaten Rembang sehingga mereka

memberikan dukungan penuh terhadap diimplementasikannya kebijakan beasiswa ini.

Berdasarkan adanya peran dari ketiga lingkungan eksternal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan sosial dan politik di Kabupaten Rembang telah berperan aktif dalam memberikan dukungan positif terhadap implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Sedangkan lingkungan ekonomi masih menjadi faktor penghambat, dimana masih terdapat kestabilan alokasi DPA yang disebabkan oleh tidak stabilnya pencapaian pendapatan daerah Kabupaten Rembang dan secara tidak langsung mempengaruhi keterbatasan jumlah kuota penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

### 1) Tujuan Kebijakan

Tujuan ditetapkannya kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati

Rembang Nomor 48 Tahun 2020 adalah untuk meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Rembang yang berprestasi dan berasal dari latar belakang keluarga tidak mampu. dan juga bertujuan untuk meningkatkan IPM Kabupaten Rembang.

## 2) Pelaksanaan kebijakan

Seluruh mekanisme pemberian beasiswa dan rangkaian kegiatan dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Rembang No. 48 Tahun 2020.

Implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung dan menghambat sebagai berikut.

### 1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan beasiswa ini adalah sebagai berikut.

#### a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi didasarkan pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi

Pendidikan Tinggi dan Petunjuk Teknis Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. Sasaran yang dijadikan arah berjalannya kebijakan ini adalah tercapainya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang.

#### b) Sumber Daya Manusia

Seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang telah terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi mulai dari pembentukan tim hingga monitoring.

#### c) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi telah dicukupi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam rangka menyukseskan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

#### d) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana dalam penelitian ini dilihat dari kesesuaian implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang dengan standar dan prosedur yang ada di perguruan tinggi. Mulai dari proses validasi data hingga pencairan, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Kabupaten Rembang telah memenuhi prosedur yang ada di perguruan tinggi.

e) Respon Implementor

Staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang sebagai implementor kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi telah menunjukkan respon yang baik. Baik itu dalam memberikan pelayanan terkait pengumpulan berkas administrasi pendaftaran maupun saat mengumpulkan LPJ beasiswa.

f) Disposisi Implementor

Disposisi implementor atau sikap para pelaksana kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi telah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari kognisi atau pemahaman implementor staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah menunjukkan kualitas yang baik. Dimana staff dapat memberikan jawaban yang dapat membantu mahasiswa yang belum memahami berbagai hal terkait Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Dilihat dari intensitas atau preferensi nilai, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai implementor kebijakan telah melakukan pemenuhan azas transparansi, akuntabilitas, serta mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam interaksinya dengan mahasiswa.

g) Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan telah dijalankan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dengan berbagai instansi terkait. Baik dalam bentuk dukungan, koordinasi, dan kerja sama telah dipelihara dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

h) Lingkungan Sosial

Adanya dukungan dari lingkungan sosial dapat membantu kesuksesan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Dukungan sosial ini dapat dilihat dari partisipasi mahasiswa penerima beasiswa yang tergabung dalam organisasi FABs Rembang dalam membantu menitipkan informasi kepada kepala desa mengenai adanya kebijakan beasiswa dari pemerintah. Dari sini, kepala desa di Kabupaten Rembang juga memberikan dukungannya dengan membantu menyebarkan informasi terkait adanya beasiswa pemerintah kepada warganya.

i) Lingkungan Politik

Sejauh ini, belum ada pihak eksekutif maupun legislatif yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap adanya kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Mereka selalu memprioritaskan pengaturan dana

untuk kebijakan beasiswa ini demi tercapainya peningkatan IPM Kabupaten Rembang yang merupakan sasaran dari kebijakan ini sendiri.

## 2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan beasiswa ini adalah sebagai berikut.

### a) Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi masih terbatas, sehingga jumlah kuota mahasiswa penerima beasiswa masih dibawah standar yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

### b) Sumber Daya Waktu

Dalam hal pembentukan tim hingga proses monitoring implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, sumber daya waktu memang telah digunakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Tetapi, terkait sumber daya waktu dalam proses pencairan belum berjalan dengan baik. Pencairan beasiswa tidak selalu tepat waktu. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan internal mahasiswa penerima beasiswa yang seringkali lambat mengumpulkan laporan pertanggungjawaban dan

faktor eksternal berupa permasalahan anggaran pemerintah. Adanya permasalahan ini dapat mempengaruhi lama waktu pencairan beasiswa.

### c) Lingkungan Ekonomi

Adanya potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak memenuhi target pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang, dapat mempengaruhi naik turunnya alokasi DPA di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Dampak akhirnya adalah terjadinya ketidakstabilan jumlah kuota penerima beasiswa.

## SARAN

Mengenai faktor-faktor yang masih belum terlaksana dengan baik dan pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

- 1) Mengenai sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan yang masih terbatas, peneliti menyarankan pemerintah Kabupaten Rembang dapat meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dalam bentuk sumbangan dana.
- 2) Terkait dengan masih ditemuinya keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban beasiswa oleh

mahasiswa penerima beasiswa, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dapat menerapkan dengan tegas mengenai tenggat waktu pengumpulan laporan pertanggungjawaban beasiswa dan menerapkan sanksi apabila masih terdapat keterlambatan pengumpulan laporan.

- 3) Terkait dengan adanya potensi tidak terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya dapat menghambat alokasi anggaran kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, peneliti menyarankan pemerintah Kabupaten Rembang untuk mendorong diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan mengembangkan sektor ekonomi lokal yang potensial, seperti pariwisata, industri kreatif, dan sektor lainnya yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- BPS Kabupaten Rembang. (2023). *KABUPATEN REMBANG DALAM ANGKA 2023* (B. K. Rembang (ed.)). BPS Kabupaten Rembang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2022). *ANALISIS KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH 2022*.
- Subianto, A. (2020). *KEBIJAKAN*

*PUBLIK*. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*. Brilliant, PT. Menuju Insan Cemerlang.

- Tachjan, T. (2006). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); 1st ed.). APII Bandung.

### Jurnal:

- Dissa, R. J., & Waworundeng, W. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM “BEASISWA MINSEL PERUBAHAN” DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *POLITICO; Jurnal Ilmu Politik*, *XII*(3), 374–386.
- Fitri, U., & Novandri, R. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA SEBAGAI LANGKAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PARIAMAN. *JOELS; Journal of Election and Leadership*, *3*(2), 93–101.
- Hussein, M. H., Albab, U., & Fatah, Z. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM SATU DESA DUA SARJANA DALAM MEMBANTU MENCEGAH KESENJANGAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BLORA. *SAP; Soetomo Administrasi Publik*, *1*(3), 145–160.
- Khoiriyah, U., & Ahmad, M. (2023). POLICY IMPLEMENTATION OF THE BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA (BPI) PROGRAM BY THE KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI (KEMDIKBUDRISTEK). *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *4*(3), 1189–1202.  
<https://doi.org/10.51276/edu.v4i3.499>

Kurniawan, E. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI KELURAHAN TELUK BELITUNG KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. *Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*.

Nurhasanah. (2012). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TICKETING DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI (DAOP) 2 BANDUNG. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia*, 26–41.

Tumundo, E. C., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN MINAHASA UTARA. *JURNAL GOVERNANCE*, 3(1), 1–7.

Utami, Y. P. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA DAERAH UNTUK MAHASISWA KABUPATEN LAMANDAU. *JISPAR; Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2285>

#### **Dokumen dan Regulasi Pemerintah:**

Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi

Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi

Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang

Petunjuk Teknis Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah